

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI PAMONG PRAJA PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Muhajir¹, Hamiyuddin²

¹Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia
email: muhajirhajir0296@gmail.com

Abstract: *This research aims to understand the fiqh siyasah review of the role of civil service police officers and the obstacles that arise in carrying out their duties and the role of civil service police in implementing restrictions on community activities in Palu. This research uses an interdisciplinary approach to study a topic/problem, where communication, collaboration and integration occur, starting from definition, objectives, process and data collection to analysis and conclusions. The subjects in this research consisted of the secretary and head of public protection. The siyasah fiqh review of the role of the civil service police when restrictions on community activities were implemented in the city of Palu is in accordance with the siyasah fiqh principles. The efforts made by the Civil Service Police have helped increase awareness and provide understanding to the public so that Palu City is free from Covid-19. The conclusion from the research results is that cooperation between officials such as the Civil Service Police, TNI, Polri, Transportation Service and the community can help Palu City be free from a spike in exposure to Covid-19 when restrictions on community activities are imposed.*

Keywords: *figh siyasah, pamong praja, covid-19*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan memahami ulasan fiqh siyasah tentang peran aparat polisi pamong praja serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan peran polisi pamong praja pada pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner untuk mengkaji suatu topik/masalah, dimana terjadi komunikasi, kolaborasi, dan integrasi, mulai dari definisi, tujuan, proses, dan pengumpulan data hingga analisis dan kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari sekretaris dan kepala perlindungan publik. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Polisi pamong Praja pada saat diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat di kota Palu sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah. Upaya yang dilakukan Polisi Pamong Praja turut meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar Kota Palu terbebas dari Covid-19. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah adanya kerjasama antar aparat seperti Polisi Pamong Praja, TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan masyarakat dapat membantu Kota Palu terbebas dari lonjakan peningkatan paparan Covid-19 ketika diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kata Kunci: *figh siyasah, pamong praja, covid-19*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang juga terjangkit wabah Covid-19. Diketahui bersama bahwa virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, virus corona jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kasus luar biasa di Wuhan, China pada Desember 2019 yang menyebabkan munculnya penyakit yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)¹. Keterlibatan pemerintah Indonesia dan semua jajarannya sampai ke pelosok-pelosok desa sangat memegang peranan penting dalam penanggulangan virus tersebut. Unsur-unsur terkait dalam pengamanan di setiap daerah juga melibatkan satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) yang juga memegang peranan penting dalam membantu pemerintah mengatasi penyebaran virus ini dari awal tersebar virus tersebut sampai pengendaliannya di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditingkatkan dengan PPKM.

Peran satuan polisi pamong praja bersama TNI dan Polri sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang selanjutnya ditingkatkan dengan PPKM. Peraturan Pemerintah di kota Palu secara maksimal sebagai wujud dari percepatan penanganan Covid-19 dapat dilihat dari keberadaan masyarakat kota palu masih ada saja yang melanggar bahkan tidak mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, oleh karena itu peran dari satuan polisi pamong praja sangat diharapkan.²

Penelitian terdahulu oleh Tegar Bagas Permana dengan judul : “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Dan Pengendalian Covid-19”, menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya satuan polisi pamong praja memberikan sanksi sesuai dengan peraturan bupati kabupaten Tegal, dan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan manajemen yang di atur oleh kepala satuan polisi pamong praja,³. Selain itu, Indra Jaya Sabir dalam penelitiannya berjudul: “peran satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi covid-19 di kabupaten mamuju provinsi Sulawesi barat”, menunjukkan bahwa peran polisi pamong praja di kabupaten Mamuju dikatakan sudah baik, dapat diukur dengan indikator peran satuan polisi pamong praja yaitu ketersediaan SDM, ketersediaan fasilitas,

¹ Yayasan sayangi tunas cilik (YSTC) member of save the children, 2020 “*informasi tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)*”, (<https://stopppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>).

²Republik Indonesia, *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 Tentang “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Level 3, Level 2, Dan Level 1”*. Serta *Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019”*.

³Tegar Bagas Pernama, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Dan Pengendalian Covi-19*, (Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 62 Tahun 2020), Diss, Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

program, kordinasi, sosialisasi dan pengawasan menggunakan pendekatan induktif.⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak dari metode penelitian, pada penelitian ini lebih menekankan pendekatan interdisipliner, sehingga diharapkan memperoleh data yang dapat menjadi pembandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada tujuannya yaitu untuk memahami tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota Palu serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul pada pelaksanaan tugas dan peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota Palu. Adapun manfaat dari penelitian ini mendorong pihak terkait untuk dapat melaksanakan secara nyata penanganan serupa bagi individu-individu maupun pada satuan polisi pamong praja kota Palu dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada masa PPKM.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian interdisipliner bertujuan untuk meneliti suatu topik/isu, dimana terjadi komunikasi, kolaborasi, dan integrasi, mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan kesimpulan.⁵ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian interdisipliner, karena penulis ingin mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Pamong Praja (satuan polisi pamong praja) Pada Masa PPKM.

Desain penelitian ini adalah hukum empiris, hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶ Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan peran polisi pamong praja pada masa PPKM.

Penelitian ini didesain menggunakan metode deskriptif yang di maksudkan untuk memberikan gambaran secermat mungkin agar penelitian ini benar-benar dapat memperoleh data-data yang valid, sehingga dapat mempertahankan kebenaran serta keabsahan dari hasil penelitian untuk digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Dalam penelitian ini fokus peneliti yaitu pada peran polisi pamong praja.

⁴Indra Jaya Sabir, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. Diss, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Pratikum Penulisan Artikel*, 208

⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), 280

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tinjauan fiqh siyasah sendiri Satuan polisi pamong praja merupakan aparat pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemimpin atau ulil amri yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan sehingga harus ditaati. Sebagaimana firman Allah dalam Prinsip Hak dan Kewajiban terdapat dalam Q.S. An Nisa (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya⁷

Islam dengan tegas mengatur bahwa setiap manusia harus taat kepada Allah, Rasul serta ulil amri. Hal ini bertujuan agar setiap manusia mendapatkan kemaslahatan dalam hidup karena telah mentaati perintah dari Allah Swt, Rasul juga. Mentaati ulil amri itu berarti telah taat dan patuh pada Allah Swt dan juga Nabi Muhammad Saw. Perintah untuk taat pada ulil amri pun sudah dengan jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi, umat manusia harus taat dan mematuhi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hal ini sangat penting dilakukan agar terciptanya lingkungan yang tertib dan juga tentram. Jika, kemaslahatan masyarakat sudah tercipta maka dapat dipastikan masyarakat akan hidup tertib, aman dan juga tentram. Selain itu, ulil amri juga menangani urusan-urusan umum seperti, urusan perdagangan, peperangan, pertanian, perdamaian, administrasi, politik dan perindustrian. ulil amri juga memegang tanggung jawab mengenai urusan-urusan masyarakat yang menjadi rujukan dalam kemaslahatan mereka.⁸

Dalam fiqh siyasah Satuan polisi pamong praja merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, yang mana di dalam fiqh siyasah pemimpin disebut dengan ulil amri. ulil amri memiliki kekuasaan untuk memerintah serta melaksanakan penegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, ulil amri juga memiliki kekuasaan untuk memerintahkan tugas lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip pelaksanaan hukum. Apabila hukum telah terlaksana, maka keadilan akan terpenuhi sehingga masyarakat akan hidup aman dan damai. Selain itu, terdapat larangan untuk

⁷Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata...*,

⁸Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119

berbuat keji, permusuhan dan melakukan kemunkaran yang berkaitan dengan terpeliharanya hak-hak manusia dan ketertiban umum serta tegaknya hukum yang berlaku. Tugas ulil amri juga sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dimana manusia dituntut untuk berlaku adil serta menjauhi perbuatan yang munkar. Harus menakar dan menimbang sesuatu secara jujur sehingga terhindar dari perselisihan dan buruk sangka terhadap orang lain. Kewajiban seorang mukmin adalah menyuruh dan mengajak mukmin lain melakukan perbuatan baik dan mencegahnya dari perbuatan munkar. Karena tugas amar makruf nahi munkar merupakan bentuk identitas dari umat Islam sebagai umat terbaik.⁹

Dari penjelasan di atas bersesuaian dengan peraturan gubernur Nomor 32 tahun 2020 Tentang "Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus disease 2019* tertuang pada pasal 8 ayat (2) kepala satuan polisi pamong praja daerah provinsi dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan tentara nasional Indonesia, kepolisian daerah Sulawesi tengah dan satuan tugas penanganan *coronavirus disease 2019*. Sebagai rujukan untuk menjalankan tugas dalam menertibkan masyarakat agar terhindar dari kemudharatan penyakit menular *covid-19*. Maka penelitian ini termasuk dalam fiqh *siyasah dusturyyah* yang secara spesifik membahas tentang *siyasah tasri'iyah* yaitu persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat dalam satu Negara, seperti Undang-undang dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.¹⁰

Kemudian dalam pandangan Islam covid-19 atau penyakit menular juga ada di zaman Rasulullah Saw masih hidup, sakit merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang saleh dan berakhlak ulil amri sekalipun Artinya orang yang terkena penyakit belum tentu sakitnya itu akibat perbuatan dosa yang dilakukannya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. Allah Swt dan Q.S. A-Anfal (8) : 25

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

"dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya".¹¹

Adanya tertuang intruksi Presiden dan Peraturan gubernur provinsi Sulawesi tengah nomor 32 tahun 2020 tentang "penerapan disiplin dan penegakan

⁹H.Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15

¹⁰Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang "Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*".

¹¹Sulaiman bin Al-Asy'ats, *kitab sunan Abu Daud juz 5*, (Cet; 1 : Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H), 19.

hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019” Maka untuk mengendalikan penyebaran wabah Covid-19 yang khususnya di Kota palu, peran Satuan polisi pamong praja sebagai menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan serta sebagai penegak peraturan. Satuan polisi pamong praja memiliki fungsi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut yang khususnya pada masyarakat kota palu. Dengan adanya intruksi presiden dan peraturan gubernur Sulawesi Tengah Satuan polisi pamong praja memberikan penegakan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kewajiban yang harus ditegakan pada masyarakat agar patuh dalam percepatan pengendalian penanganan wabah ini. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas sebagai pembantu Kepala Daerah dituntut dapat menciptakan suatu kondisi masyarakat yang aman, tentram dan tertib serta teratur dalam penyelenggaraan roda dalam pemerintahan dapat berjalan dengan lancar di saat pandemi virus Covid-19 maupun dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya dengan aman sehingga kehidupan apalagi disaat pandemi ini berlansung, dimana Satuan polisi pamong praja hak tertuang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang “satuan polisi pamong praja.¹²

Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini merupakan bagian dari suatu lembaga yang diatur dengan undang-undang, yang bertugas menjamin terpenuhinya kewajiban ketertiban umum dan terpenuhinya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam peraturan yang berlaku saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari penegakan aturan dan ketertiban masyarakat. Melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban masyarakat, satuan kepolisian pamong praja mempunyai tugas melaksanakan tugas pengendalian ketertiban umum dan menjamin ditaatinya peraturan-peraturan lain. Ketertiban umum dan penegakan peraturan adalah suatu keadaan yang cukup dinamis, untuk memungkinkan Satuan polisi pamong praja melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat pada masa wabah virus Covid-19 dan menjaga ketertiban umum di sekitarnya sebagai wujud untuk pencegahan penularan wabah virus Covid 19 ini. Dalam ketentuannya Satuan polisi pamong praja dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, Satuan polisi pamong praja memiliki tugas fungsi sebagai penegak peraturan yang tertuang pada peraturan pemerintah yang merupakan aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas pokok serta fungsi tercantum dalam PP Nomor 16 Tahun 2018. Satuan polisi pamong praja berperan dalam menjaga kenyamanan Kota/Kabupaten yang meliputi tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan maupun Peraturan Kepala Daerah, serta peraturan lainnya yang sifatnya menegakkan serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.¹³

¹²Republik Indonesia, *Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 Tentang “Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan pengendalian Corona Virus Disease 2019”*.

¹³Admin, *Satpol Pp Jadi Garda Terdepan Penegakkan Protokol Kesehatan* “<https://www.malukuterkini.com/2021/11/15/satpol-pp-jadi-garda-terdepan-penegakkan-protokol-kesehatan/>” (23 juli 2022).

Satuan polisi pamong praja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perintah dan penguasa daerah, satuan kepolisian adalah satuan kepolisian yang membantu direktur daerah yang tugasnya adalah menjamin ketertiban masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja membantu pemerintah provinsi dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja membantu pelaksanaan peraturan daerah dan ketertiban umum serta memberikan kenyamanan kepada warga di wilayahnya untuk mencegah penyebaran virus Covid. 19 epidemi virus. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja memiliki posko daerah, perintah pelaksana lainnya. Sehubungan dengan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, penegakan dan pengawasan disiplin kegiatan kesehatan, Polsek Pamong Praja adalah satuan kepolisian yang berbentuk satuan organisasi, yang unsur pendukungnya adalah pemerintah daerah/kota, sipil. melayani Satuan polisi yang berstatus satuan organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan yaitu satuan polisi pamong praja bertanggung jawab langsung kepada penguasa dalam melaksanakan tugasnya. Satuan polisi sipil dalam pelaksanaan tugas pokoknya dibantu oleh satu satuan polisi pembantu dan beberapa komandan satuan teknis.

Sebagai bagian dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan sebagai bagian dari tugasnya untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pada prinsipnya memiliki ruang lingkup yang luas, terutama untuk memenuhi ketentuan terhadap protokol disiplin Protokol Kesehatan Covid-19. . . sehingga satuan polisi pamong praja harus memenuhi tugasnya sebagai institusi milik pemerintah untuk menegakkan disiplin praktik kesehatannya. Jika melihat ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Satpol PP memiliki fungsi operasional, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan terhadap peraturan yang ada dalam penertiban penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Sesuai dengan tugasnya, Satpol PP adalah pengawas ketertiban umum dan penegakan peraturan, Satpol PP menindak pelanggar ketertiban umum yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 sesuai peraturan, agar warga. Kota Palu melakukan penertiban protokol kesehatan, oleh karena itu harus mengoordinasikan penertiban protokol kesehatan dengan otoritas pelaksana.

Pada dasarnya, ajaran Islam sesuai dengan pedoman gaya hidup sehat jasmani dan rohani. Di antaranya, Islam mengajarkan untuk menjauhi penyakit dan berobat ketika sakit, bersabar dan banyak berdoa jika ada musibah, pantang menyerah, serta merawat dan mengobati orang sakit dengan baik. Penyakit menular yang disebabkan oleh virus pada manusia seringkali menimbulkan kecacatan dan resiko kematian, karena tidak ada kekebalan bawaan (alami) untuk menghancurkan virus tersebut. Selain itu, daya tahan tubuh yang masih lemah terutama pada anak-anak membuat virus yang terinfeksi tidak dapat dimusnahkan. Banyak hal dalam pencegahan penyakit menular yaitu penghindaran, toleransi, percaya diri, kesabaran, optimisme, sehingga dapat dipahami bahwa wabah tidak hanya terjadi di zaman modern seperti saat ini, tetapi juga berkembang dari waktu ke waktu. dari nabi Muhammad. sesuatu yang baru dalam Islam, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW memberitakan peristiwa ini, yaitu wabah yang terjadi saat itu, penyakit pes dan penyakit kusta. Wabah merenggut nyawa, termasuk para sahabat Nabi Muhammad, Mu'adz ibn Jabbal, Abu Ubaidah, Syarhbil ibn Hasanah dan al-Fadl ibn al-Abbas ibn Abu Muthalib. Wabah penyakit manusia saat ini dan yang lalu berbeda, tetapi ada kesamaan dalam proses penyebaran dan akibat dari

wabah tersebut, misalnya penyebarannya sangat cepat dan yang terinfeksi dapat menyebabkan kematian. keberadaan virus corona adalah salah satu ujiannya. Semua orang takut dan khawatir dengan penyebaran virus COVID-19 ini.

1. Satpol PP khususnya di kota Palu berperan menurut fikih siyasah, karena tugas dan fungsi Satpol PP sesuai dengan ulil amri, karena ulil amri adalah penguasa Islam. yang memiliki hak untuk memutuskan dan lebih memilih yang baik daripada yang jahat. Dimana ulil amri merupakan bagian dari siyasah fiqh yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan peraturan yang ada. Dalam PPKM periode tersebut, prinsip fikih siyasah terkait dengan peran polisi pelayanan publik yaitu:
 2. 1. Prinsip ketaatan rakyat, yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat, Al-Qur'an menetapkan prinsip yang bisa disebut prinsip ketaatan rakyat. Ketetapan ketaatan kepada rasul yaitu Nabi Muhammad SAW dan ulil amr tunduk pada ketetapan penguasa masing-masing sebagai bagian dari tugas resminya. Jadi kepatuhan masyarakat mengikuti protokol kesehatan selama PPKM termasuk dalam prinsip kepatuhan rakyat
 3. 2. Prinsip-prinsip hak dan kewajiban Islam meliputi hak asasi manusia yang sudah terdapat dalam al-Qur'an, seperti hak untuk hidup, hak atas harta benda, hak kebebasan beragama, hak menjaga martabat manusia. , hak atas kontrol sosial, hak atas kehidupan hukum, dll. Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang dipercayakan kepada satuan kepolisian harus dilaksanakan dan dilaksanakan dengan baik, termasuk menjaga ketertiban umum selama PPKM.
 3. 3. Prinsip Amar Makruf dan Nahi Munkar Menurut prinsip ini pemerintah harus memiliki kepedulian sosial terhadap kewajiban Amar Makruf dan Nahi Munkar. Tujuan pemerintah adalah untuk memperkuat hak atas kemakmuran dunia dan melarang apa yang dilarang. Dengan demikian masyarakat dan pemerintah akan menempuh jalan yang diridhoi Allah.¹⁴

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan pada pelaksanaan tugas dan peran polisi pamong praja pada masa ppkm di kota palu antara lain:

1. Banyaknya pelaku usaha mikro tidak memahami peraturan daerah dan peraturan gubernur untuk menghindari pengujung. Terkait masalah kendala tersebut, Satpol PP berupaya mengatasi masalah tersebut.
2. Masyarakat belum sadar mengikuti anjuran kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, sehingga pihak kepolisian kota Palu harus lebih sabar..
3. Kualitas sumber daya manusia (SDM) Satuan polisi pamong praja terbilang kurang sebanyak 20% anggotanya karena cakupan wilayah yang luas yaitu sekota palu. Satuan polisi pamong praja berupaya untuk bisa mencukupi kurangnya sumber daya manusia tersebut.

Ternyata dengan upaya yang dilakukan satuan polisi pamong praja dengan memberikan sanksi sebagai efek jera, berpatroli menyusuri tempat-tempat yang selalu ramai masyarakat, dan dukungan pihak TNI, Polri dan dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya dapat menjadi salah satu solusi sebagai

¹⁴J.Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 142

perpanjangan tangan pemerintah terhadap masa PPKM yang dapat dikatakan sudah berjalan efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dengan mengajukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dapat diambil kesimpulan bahwa, tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota palu, sudah dapat dikatakan bersesuaian dengan prinsip fiqh siyasah karena adanya upaya dari pihak satuan polisi pamong praja yang membantu menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga kota palu terbebas dari covid-19. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas polisi pamong praja ada hambatan-hambatan yang ditemui pada saat menjalankan tugasnya dimasa PPKM antara lain kurangnya pemahaman masyarakat usaha mikro yang berkali-kali mendapatkan teguran atas ketidak patuhan terhadap prosedur surat edaran dari pemerintah maka satuan polisi pamong praja memberikan sanksi sebagai efek jera, kemudian terhadap ketidak sadaran masyarakat terhadap ketidak patuhan atas protokol kesehatan sehingga satuan polisi pamong praja melakukan patroli menyusuri tempat-tempat yang selalu ramai dikunjungi masyarakat, dan yang terakhir kurangnya sumber daya manusia tetapi dengan adanya gabungan TNI,Polri dan dinas perhubungan dapat memaksimalkan kinerja dari tugas-tugas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim, Dan Terjemahnya

Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Presada , 2001),

Admin, Satpol Pp Jadi Garda Terdepan Penegakkan Protokol Kesehatan "<https://www.malukuterkini.com/2021/11/15/satpol-pp-jadi-garda-terdepan-penegakkan-protokol-kesehatan/>" (23 jUlil 2022).

Al-Asy Sulaiman bin "ats, *kitab sunan Abu Daud juz 5*, (Cet; 1 : Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H).

Ali Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris*, (Kencana, Makassar:1998).

Al-Maraghi Ahmad Musthafa, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986).

Azhari Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*, (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2015).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

DjazUlil A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).

E, Utrecht *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Cet . 8; Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1985).

Fajar Mukti dan Yulilanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010).

<https://kbbi.web.id/peran> (2 maret 2022).

Ibnu Hakim, Muhammad Irjik. “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)*”. Diss. Universitas Muhammadiyah Jember, 2021.

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Pratikum Penulisan Artikel*, 2.

Khaliq Farid Abdul, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah,2005).

Lembaga Penjamin Mutu, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Palu:LPM IAIN Palu, 2015).

Milles Metthew B, dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif* (Cet. 1;Jakarta: UI Press, 2005).

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

Mukharom, Havis Aravik, “*Kebijakan Nabi Muhammad Saw menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*”, dalam Jurnal Salam, Vol. 7 No. 3 2020.

Republik Indonesia, *peraturan gubernur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang “Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019”*.

Sabir Indra Jaya, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. Diss, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

Satuan Polisi Pamong Praja, Sejarah ”<https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/profil-dansejarah#:~:text=Sejarah%20Polisi%20Pamong%20Praja%20didirikan,mewadahi%20sebagian%20ketugasan%20pemerintah%20daerah.&text=Pada%20tanggal%2010%20November%201948,dibentuk%20tanggal%203%20Maret%201950>” diakses pada, (4 maret 2022).

Siregar Azhari, *Implementasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kota*

Padangsidimpuan Pada Masa Pandemi Covid-19, Diss, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

Suprayogo Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).

Pulungan J. Sayuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

Sutarjo Dadang, Skripsi: “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi*”(Jambi: UIN STS JAMBI,2019).